

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BARITO KUALA**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala telah dan terus berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

**PPKS** (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. sedangkan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Pada Sekretariat, menghimpun program / kegiatan bidang terkait penanganan PPKS dan PSKS dan mengelola kesekretariatan.
2. Pada Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial, menangani PPKS (Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi, Keluarga Rentan) dan bantuan rumah tidak layak huni serta Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
3. Pada Bidang Rehabilitasi Sosial, menangani PPKS (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis)
4. Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani korban bencana alam dan sosial, dan rumah tangga sangat miskin serta Wanita Rawan Sosial Ekonomi,

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada indikator dengan capaian kinerja untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” tercapai realisasi sebesar 92,71 persen, sedangkan indikator “ sasaran ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” capaian realisasi sebesar 0,73 persen dan capaian realisasi pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 71,91 persen dari target “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sebesar 69,02 persen, sedangkan indikator sasaran ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” target sebesar 1,31 persen dan target pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 71,86 persen. Dengan kategori “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” Sangat Baik, sedangkan indikator “ sasaran ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” Kurang dan Kategori pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah Sangat Baik.

Peningkatan ini di pengaruhi oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yaitu 143 % dan Program pemberdayaan Sosial 106 %. Dan untuk realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 100%, serta Pelayanan pada korban bencana alam dan sosial adalah 93%. Adapun Capaian realisasi kinerja dengan kegiatan yang mencapai 97,37% adalah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. Adapun jenis pelayanan dengan realisasi Penanganan orang terlantar, eks napi adalah 78,79%.

## DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi .....	3
1.3 Isu Strategi Organisasi .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
2.1 Perencanaan Strategi .....	7
2.1.1 Tujuan .....	7
2.1.2 Sasaran .....	7
2.2 Perjanjian Kinerja .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	12
1. Capaian Kinerja Dinas Sosial .....	14
1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	14
1.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis .....	17
1.2.1. Pengukuran Kinerja .....	17
B. Akuntabilitas Keuangan .....	38
BAB IV PENUTUP .....	41
LAMPIRAN	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban urusan wajib dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai peran yang signifikan dan terus berupaya dalam penerapan prinsip dasar *good governance*. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Kuala selain sebagai perwujudan amanat konstitusi juga ditujukan dalam rangka Tujuan RPD 2023-2026 adalah : “Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktifitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah Dalam Rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Daerah” dimana Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan misi ke-3, yaitu : “Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesional Sumber Daya Manusia”. Pada tahun 2024 Dinas Sosial melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan sasaran Kinerja Utamanya adalah Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran kinerja utama ini didukung oleh sasaran kinerja yang lain yang direalisasikan oleh bidang-bidang teknis yang ada pada Dinas Sosial yaitu

meningkatnya Pemberdayaan keluarga miskin, meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar, meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk Lanjut Usia Terlantar dan meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin melalui bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako dan kepesertaan PBI.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting lainnya dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut, dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan dapat :

Memberikan informasi kinerja yang teratur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Mendorong Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kinerjanya.

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi**

### **Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai Instansi Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala bertugas melaksanakan urusan di bidang Sosial dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang uraian tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

**Tugas :**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

**Fungsi :**

Dinas Sosial Kabupaten Barito kuala melaksanakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

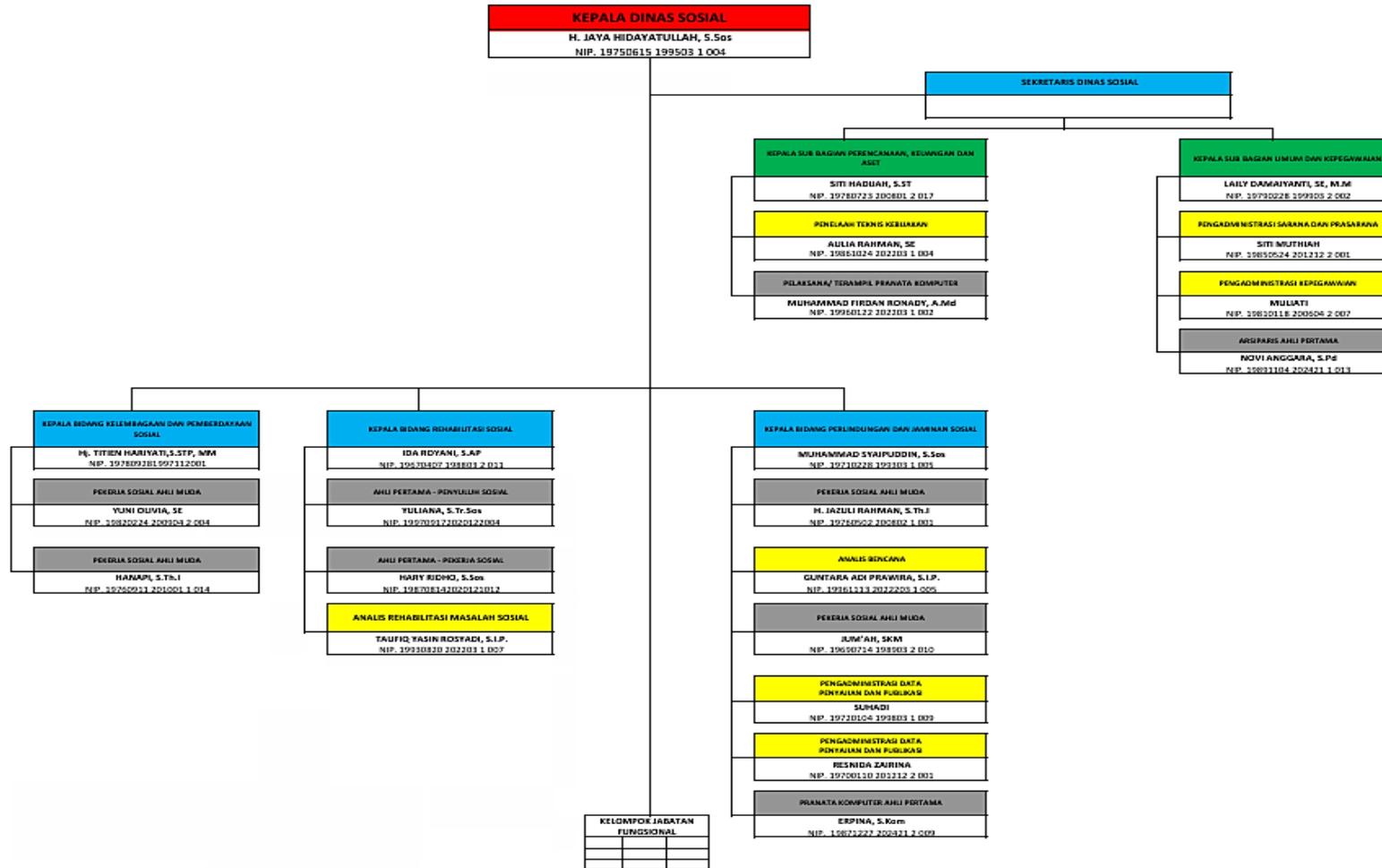
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**

<b>No.</b>	<b>Jabatan / Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
1.	ASN Dinas Sosial	22 orang
	Eselon II	1 Orang
	Eselon III	3 Orang
	Eselon IV	2 Orang
	Pejabat Fungsional	7 Orang
	Pelaksana	7 Orang
	PPPK	2 Orang
2.	Tenaga Honorer Dinas Sosial	15 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>37 Orang</b>

Adapun Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi tersebut adalah Gedung Kantor Dinas Sosial, Bangunan Sekretariat PKH, Rumah Singgah dan Gedung/Gudang Logistik, sedangkan sarana mobilitas pendukung dari Kementerian Sosial untuk operasional bencana berupa Mobil Truk, Mobil Recue Tactical Unit (RTU), Mobil DUMLAP (Dapur Umum Lapangan), Kendaraan Trail, Perahu Dolphin. Sarana mobilitas pendukung dari Pemda Barito Kuala adalah Mobil Innova Merk Toyota 1 buah, Mobil Toyota Avanza 1 buah, Mobil APV 1 buah.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**

### 1.3 Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, telaah tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah: “Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal dan Belum Optimalnya Nilai SAKIP Dinas sosial, yang diiringi dengan:

1. Ketersediaan *database* PPKS yang terus mengalami perbaikan/verifikasi.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PPKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah dihilir, sementara akar masalah ini tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PPKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan Dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
4. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
5. Perumusan strategi perlindungan dan pemberian jaminan sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah sosial di daerah.
6. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
7. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS itu sendiri.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

## **2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2023–2026 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2023-2026 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial.

### **2.1.1 Tujuan**

Tujuan Renstra Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

### **2.1.2 Sasaran**

Sasaran Renstra Dinas Sosial adalah Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dibuat Indikator kinerja yang akan dicapai, yaitu: “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, Persentase

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial”, melalui kegiatan :

- 1) Dari segi kelembagaan sosial, telah terdata sebanyak 4 (empat) buah organisasi yang berbasis sosial kemasyarakatan. Namun demikian kemampuan operasional organisasi sosial masih terkendala pada kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kedepan akan dilakukan pendataan kelembagaan sosial yang lebih komprehensif.
- 2) Data jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Barito Kuala hingga bulan Desember 2023 berjumlah 125.287 KK/jiwa, kemudian data ini dilaksanakan verifikasi dan validasi sehingga data yang didapatkan per Desember 2023 berjumlah 755 KK/jiwa.
- 3) Pada tahun 2024 telah disalurkan bantuan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan kriteria:
  - Masuk didalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
  - Mempunyai embrio usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan
  - Telah menikah (keluarga dewasa)
  - Keterbatasan kemampuan sosial ekonomi, sehingga berpotensi bermasalah
  - Pekerjaan tidak tetap atau punya pekerjaan tetapi tidak memiliki keterampilan khusus
  - Rumah yang mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan rumah tangga tidak berada di jalur hijau dan mempunyai bukti kepemilikan tanah.

Adapun bantuan sosial yang diberikan berupa :

- a) Bantuan sosial untuk 8 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mendapat bantuan berupa 8 set tenda dan perlengkapannya;
- b) Bantuan sosial barang untuk 3 Orang Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) mendapat bantuan ternak ayam berupa 60 ekor ayam, 3 buah lampu pijar, 9 buah tempat minum ayam, 3 buah kandang, 9 buah tempat makan ayam dan 3 zak pakan.
- c) Bantuan sosial untuk 8 KK Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga untuk Bedah Rumah Sehat Ala TP-PKK mendapat bantuan berupa peralatan dan perlengkapan rumah tangga.
- d) Bantuan berupa pelatihan keterampilan sebanyak 60 orang.

- e) Bantuan sosial berupa barang 40 paket untuk anggota veteran dan janda veteran berupa paket sembako.
  - f) 48 orang Lansia yang menerima bantuan berupa paket sembako.
  - g) Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan alat bantu sebanyak 3 orang.
  - h) Penyandang disabilitas yang mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 2 orang
  - i) Anak terlantar yang mengikuti pelatihan kerja sebanyak 13 orang
  - j) Anak terlantar yang mendapat pelayanan sosial bimbingan fisik, mental, sosial dan spiritual sebanyak 60 orang.
  - k) Sosialisasi Napza yang diberikan kepada anak sekolah sebanyak 60 Orang.
  - l) Orang terlantar, eks narapidana dan penyandang penyakit sosial lainnya yang diberi bantuan sebanyak 18 orang.
  - m) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial sebanyak 12.770 jiwa.
  - n) Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin sebanyak 22.226 KK .
- 4) Hingga bulan Desember 2024 telah disalurkan bantuan logistik dan pelayanan Psikososial kepada masyarakat korban bencana alam dan sosial sebanyak 158 KK, bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana sosial kebakaran sebanyak 27 KK dan bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana alam sebanyak 131 KK.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial**  
**Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri	1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri
			2. Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu Berusaha	
			3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan, sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki satu sasaran dengan satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri. Indikator ini didukung oleh 4 (empat) program utama dan 1 (satu) program penunjang.

Adapun 4 (empat) program utama yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp. 978.524.932,00, Program Penanganan Bencana dengan anggaran Rp. 537.318.320,00, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp. 626.877.613,00 dan Pemberdayaan Sosial dengan anggaran Rp. 1.227.826.990,00.

Sedangkan 1 (satu) program Penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.205.880.796.

Total anggaran Belanja Daerah DPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.069.859.523,00 (Delapan Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun kedua dari kerangka pembangunan lima tahunan periode 2023-2026.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	69,02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	978.524.932
					Penanganan Bencana	537.318.320
					Rehabilitasi Sosial	626.877.613
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha	%	1,31	Pemberdayaan Sosial	1.227.826.990
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	%	71.86	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.699.311.668
<b>TOTAL</b>			<b>%</b>	<b>47,39</b>		<b>8.069.859.523</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Nomor: 050/040/DISSOS, tanggal 02 Januari 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 yang semula 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama menjadi 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah Program, Kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Dalam rangka Pengukuran kinerja, dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat kriteria capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Berdasarkan Tabel 3.1 Nilai Capaian Kinerja untuk persentase < 100 mendapatkan predikat Tidak tercapai, untuk persentase = 100 mendapatkan predikat Tercapai / Sesuai target, sedangkan untuk persentase > 100 maka predikat nilai capaian kerjanya yaitu melebihi target.

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Tabel .3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

Berdasarkan Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai, dikategorikan kedalam 5 penilaian yaitu, sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang.

# 1. Capaian Kinerja Dinas Sosial

## 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : NOMOR 460/038/DISSOS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026. Adapun hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	69,02	92,71	134,32
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	Jumlah PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus	1,31	0,73	55,72
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Persen	Nilai SAKIP	71.86	71.91	100,06
<b>TOTAL</b>					<b>47,39</b>	<b>55,11</b>	<b>96,7</b>

Dari Tabel 3.1.1 di atas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sebesar 92,71%. Dalam hal ini lebih besar dari yang ditargetkan yakni 69,02%, yang berarti program yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama ”Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sebesar 0,67%. Dalam hal ini menunjukkan angka dibawah target yaitu sebesar 1,31%.

Dan untuk capaian Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” pada tahun 2024 sebesar 71,91. Dalam hal ini menunjukkan angka diatas target yaitu 71,86.

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Dinas Sosial**  
**Berdasarkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**  
**(PPKS) yang mandiri Tahun 2024**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	2

Berdasarkan Tabel 3.1.2 dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu Pertama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan capaian 134,32% dikategorikan >100% sehingga **dikategorikan Melebihi Target**, Kedua Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha dengan capaian 55,72% dikategori <100 sehingga **dikategorikan Tidak Tercapai**. dan ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dengan capaian 100,06% sehingga **dikategorikan Melebihi Target**.

Tabel 3.1.3  
Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori  
Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	1

Berdasarkan tabel diatas didapatkan 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik karena persentase capaian lebih dari 90 % dan 1 (satu) indikator dengan kategori kurang dengan persentase di atas 50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.4**  
**Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2024**

No	IKU	Formulasi	Target	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	69,02	134,32	Sangat Baik
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Jumlah PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus	1,31	55,72	Kurang

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	71.86	100,06	Sangat Baik
<b>TOTAL</b>			<b>47,39</b>	<b>96,22</b>	<b>Sangat Baik</b>

## 1.2 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

### 1.2.1 Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Sosial dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Nomor : 460/038/DISSOS tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator Sasaran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator**  
**Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**

<b>Sasaran Strategis 1</b>	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhannya	1 indikator
<b>Sasaran Strategis 2</b>	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	1 indikator
<b>Sasaran Strategis 3</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	1 indikator

Berdasarkan Tabel 3.2.1 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**SASARAN STRATEGIS 1**  
***Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***

Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (RPD) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan sasaran Menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” tersebut ditetapkan dengan indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

Berdasarkan DTKS pada tahun 2024 diketahui bahwa jenis PPKS di Kabupaten Barito Kuala terdapat 14 jenis yaitu sebanyak 16.218 KK, dan pada tahun 2024 PPKS yang telah diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 15.036 PPKS, dengan demikian capaian realisasi kinerja =

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100 =$$

$$\frac{15.036 \text{ KK}}{16.218 \text{ KK}} \times 100 = 92,71\%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 untuk indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” ditetapkan target sebesar 69,02% (11.193 PPKS) dari jumlah seluruh PPKS 16.218 PPKS.

Tahun 2024 tersebut PPKS yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 92,71 %, (15.036 PPKS) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ”Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” adalah 134,32 % ( $92,71\% / 69,02\% \times 100 = 134,32\%$ ).

**Tabel 3.2.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi**  
**kebutuhan dasarnya**  
**Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	69,02	92,71	134,32

Berdasarkan Tabel 3.2.3 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya “ tahun 2023 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 telah **tercapai** dan bahkan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam PK (mencapai 134,32 %).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 3.2.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi**  
**kebutuhan dasarnya Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	66,97	92,71

Dari table 3.2.4 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” mengalami peningkatan 25,74 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2023).

**3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.**

Realisasi kinerja indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 94,88 %. Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” di tahun 2024 telah ditetapkan 68,48 %

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi**  
**Kebutuhan Dasarnya**  
**Terhadap Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RENSTRA (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	69,02	92,71	68,48	135,38

Berdasarkan tabel 3.2.5 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 telah mencapai 134,32 %.

#### **4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional**

Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar.

#### **5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adanya komitmen pimpinan untuk memberikan bantuan terhadap PPKS dikabupaten Barito Kuala, sehingga diupayakan dan diharapkan tidak ada lagi PPKS di kabupaten Barito Kuala yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab Keberhasilan terhadap Sasaran Strategis 1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu :

- Perencanaan dan Penganggaran yang telah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku.
- Dukungan dan kordinasi yang efektif antara Pekerja Ahli Sosial dan Relawan Sosial.
- Dukungan Alat Transportasi untuk menunjang kegiatan.
- Adanya Komitmen dan kerjasama yang baik antara Pelaksana kegiatan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Tersedianya data yang valid dan terpenuhinya persyaratan secara administrasi.
- Monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan sebagai upaya menjamin pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 terhadap PPKS dikabupaten Barito Kuala antara lain :

- a. Memberikan bantuan kepada anak terlantar baik dalam panti maupun diliau panti sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala nomor : 188.45 / 377 / KUM / 2024 tanggal 9 September 2024 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Individu dan/atau Keluarga Tahun Anggaran 2024.

- b. Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 251 / KUM / 2024 Tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemberian Hibah Barang Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas.
- c. Memberikan bantuan Veteran dengan klasifikasi Janda Veteran dan Veteran Pejuang sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 369 / KUM / 2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Pemberian Barang Berupa Sembako Bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran Tahun 2024.
- d. Memberikan bantuan Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 345 / KUM / 2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2024. Dan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 454 / KUM / 2024 tanggal 18 Nopember 2024 tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2024.

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja "Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya" :

- a. Terus melaksanakan pendataan sampai verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan sasaran layanan yang tepat sesuai dengan jenis-jenis PPKS
- b. Menjalin kerjasama dengan Kementrian Sosial untuk mendapatkan akses layanan berupa bantuan dan perlindungan sosial
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan khususnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS baik kuantitas maupun kualitas
- d. Memaksimalkan penggunaan data PPKS oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membuat payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Perlunya Komitmen dan dukungan anggaran yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlayani dengan baik.

## 6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 1 ” Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2024 Rp. 2.142.720.865,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.113.252.231,00 98,62%.

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

CKi = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$\begin{aligned} &= \frac{(2.142.720.865,00 \times 134,32\%) - 2.113.252.231,00}{2.142.720.865,00 \times 134,32\%} \times 100\% \\ &= \frac{2.878.102.655,87 - 2.113.252.231}{2.878.102.655,87} \times 100\% \\ &= \frac{764.850.434,87}{2.878.102.655,87} \times 100\% \\ &= 0,266 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 0,266 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.13**  
**Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja**  
**Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	134,32	98,62	0,266%

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 1** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan tingkat efisiensi sebesar 0,266%.

**7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator kinerja “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	626.877.613,00	1.090.111.598,00	88,78	Penyediaan Alat Bantu	215.732.977,00	209.215.721,00	96,98
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.000.000,00	300.000,00	5,00
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	405.144.636,00	403.382.626,00	99,57
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	978.524.932,00	972.770.344,00	99,42	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	504.072.276,00	500.132.707,00	99,22
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	474.452.656,00	472.637.637,00	99,62
3.	Penanganan Bencana	537.318.320,00	527.583.540,00	98,19	Penyediaan Makanan	537.318.320,00	527.583.540	98,19
<b>Total</b>		<b>2.142.720.865,00</b>	<b>2.113.252.231,00</b>	<b>98,62</b>		<b>2.142.720.865,00</b>	<b>2.113.252.231,00</b>	<b>98,62</b>

## **SASARAN STRATEGIS 2**

### ***Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***

Sasaran “Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (RPD) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan sasaran Menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” tersebut ditetapkan dengan indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mampu berusaha}}{\text{Jumlah 3 jenis PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

Berdasarkan DTKS pada tahun 2024 dikabupaten Barito Kuala diketahui bahwa jumlah 3(tiga) jenis PPKS yaitu :

- a. Fakir Miskin = 14.978
  - b. Anak Terlantar = 52
  - c. dan Penyandang Disabilitas = 687
- Jumlah = 15.717 KK

Sampai dengan tahun 2024 jumlah PPKS yang telah diberi bantuan sehingga mampu berusaha sendiri (mandiri) berusaha sebanyak 115 KK. Sehingga realisasi kinerja untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha :

$$= \frac{\text{Jumlah PPKS yang mampu berusaha}}{\text{Jumlah 3 jenis PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$
$$= \frac{115 \text{ KK}}{15.717 \text{ KK}} \times 100 = 0,73 \%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 untuk indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” ditetapkan target sebesar 1,31% (212 KK) dari jumlah 3 jenis PPKS sebesar 15.717 KK.

Tahun 2024 tersebut PPKS yang mampu berusaha sebesar 0,73 %, (115 KK) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” adalah 0,73 % (  $0,73\%/1,31\% \times 100 = 55,72\%$  ).

**Tabel 3.2.3**

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama  
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mampu Berusaha  
Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	1,31	0,73	55,72

Berdasarkan Tabel 3.2.3 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha “ tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 hanya mencapai (55,72%).

**2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 3.2.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha**  
**Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	1	0,73

Dari table 3.2.4 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” mengalami penurunan sebesar 0,27 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2023) karena kemandirian dan produktifitas disabilitas masih rendah, pada sasaran lanjut usia Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berjalan tidak efektif, dan keterbatasan pendanaan/anggaran,

**3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.**

Realisasi kinerja indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 0,73 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” di tahun 2024 telah ditetapkan 1,31 %

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi**  
**kebutuhan dasarnya**  
**Terhadap Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RENST RA (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	1,31	0,73	1,31	55,72

Berdasarkan tabel 3.2.5 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 tidak tercapai ( hanya 0,73%) dari target dalam Renstra.

#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Dalam melaksanakan kerjanya, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki Indikator yang dapat dibandingkan dengan Kementerian Sosial terkait sasaran 1 yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan realisasi 92,71 seperti dibawah ini :

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama  
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi  
kebutuhan dasar pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	69,02	92,71	134,32

Sedangkan Realisasi Kinerja dari Kementerian Sosial seperti dibawah ini :

**Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	99,35	99,74	100,39

Dari tabel diatas didapat perbandingan bahwa secara realisasi kinerja khususnya pada sasaran 1, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sudah baik meskipun terdapat selisih 7,03 point dari Kementerian Sosial.

**5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Adapun Penyebab Kegagalan terhadap capaian kinerja yaitu :

- Belum maksimalnya penggunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Kabupaten/Kota sehingga penanganan PPKS masih belum merata.
- Faktor internal seperti kurangnya tenaga yang focus mengelola usaha dan faktor eksternal dari persaingan pasar
- Kurangnya dukungan anggaran terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada pengiriman Penyandang Disabilitas ke Solo dalam rangka Peningkatan Keterampilan Berusaha.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 terhadap 3 jenis PPKS dikabupaten Barito Kuala antara lain :

- a. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 363 / KUM / 2024 Tanggal 16 Agustus 2024 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) Tahun 2024. Bantuan diberikan kepada 3 Orang yaitu yang beralamat di desa Sungai Telan Besar Rt. 005 an. Bahriansyah, di desa Sungai Telan Besar Rt. 010 an. Ikas dan di desa Sungai Telan Besar Rt 010 an. Mahyudi. Adapun bantuan yang diserahkan untuk mendukung Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-) berupa 60 Ekor Ayam Buras Dara, 3 Buah Lampu Pijar, 9 Buah Tempat Minum Ayam, 3 Buah Kandang, 9 Buah Tempat Makan Ayam, 1 Set Vitamin, dan 3 zak Pakan berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 363 / KUM / 2024 Tanggal 16 Agustus 2024.
- b. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 456 / KUM /2024 Tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) Tahun 2024. Terdapat 3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu Kube “Mandiri Bersama” diketuai Ahmad Busairi di Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara, Kube “Hidayah” diketuai Aliyah di Desa Anjir Serapat Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara, Kube “Warga Membangun” diketuai Bariyah di Desa Sepakat Bersama Kec. Anjir Muara diketuai oleh Bariyah. Barang yang diserahkan berupa Tenda dan

Perlengkapannya, rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 456 / KUM /2024 Tanggal 18 Nopember 2024

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” :

- Memaksimalkan penggunaan data PPKS oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membuat payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Perlunya Komitmen dan dukungan anggaran yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlayani dengan baik.

#### 6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 2 ”Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi anggaran untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sebesar Rp. 1.090.111.598,00 dari total pagu sebesar Rp. 1.227.826.990,00 dengan capaian kinerja sebesar 55,72%

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

CKi = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$= \frac{(1.227.826.990,00 \times 55,72\%) - 1.090.111.598,00}{1.227.826.990,00 \times 55,72\%} \times 100$$

$$684.145.198,83 - 1.090.111.598,00$$

$$= \frac{\dots}{684.145.198,83} \times 100\%$$

$$= \frac{-405.966.399,17}{684.145.198,83} \times 100\%$$

$$= -0.593.$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha sebesar -0,593 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.13**  
**Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja**  
**Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha	55,72	88,78	-0.593

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 2** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha dengan tingkat efisiensi sebesar 0,593%.

**7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator kinerja

“ Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	1.227.826.990,00	1.090.111.598,00	88,78	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.227.826.990,00	1.090.111.598,00	88,78
<b>Total</b>		<b>1.227.826.990,00</b>	<b>1.090.111.598,00</b>	<b>88,78</b>		<b>1.227.826.990,00</b>	<b>1.090.111.598,00</b>	<b>88,78</b>

**SASARAN STRATEGIS 3**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial**

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” . Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Nilai SAKIP Dinsos.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” tersebut ditetapkan dengan indikator “Nilai SAKIP Dinsos” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\text{Nilai SAKIP Dinsos} = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}} \times 100$$

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor 700/78/IP/2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tanggal 08 Juli 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial menunjukkan nilai sebesar **71,91** dengan predikat “**BB**”, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos tahun 2024 = 71,91

Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos = 71,86

Maka realisasi kinerja indikator ini adalah :

Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos

$$\frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}} \times 100 =$$

$$\frac{71,91}{71,86} \times 100 = 100,06 \%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Nilai SAKIP Dinsos dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 untuk indikator kinerja "Nilai SAKIP Dinsos" ditetapkan target sebesar 71,86 dari Nilai SAKIP Dinsos.

Tahun 2024 tersebut Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos sebesar 71,91 dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja "Nilai SAKIP Dinsos" adalah 100,06% (realisasi/target x 100 = 71,91 / 71,86 x 100 = 100,06 %)

**Tabel 3.2.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Dinsos	Nilai	71,86	71,91	100,06

Berdasarkan Tabel 3.2.3 Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama "Nilai SAKIP Dinsos" tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 telah **tercapai** dan melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam PK (100,06%).

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP Dinsos tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 3.2.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Nilai SAKIP Dinsos	Nilai	71,86	71,91

Dari table 3.2.4 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Dinsos” mengalami peningkatan sebesar 0,05 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2023).

**3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.**

Realisasi kinerja indikator “Nilai SAKIP Dinsos” sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100,06 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Nilai SAKIP Dinsos” di tahun 2024 telah ditetapkan 71,95 %

**Tabel 3.2.5  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Nilai SAKIP Dinsos Terhadap Target Tahun 2024**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target RENSTRA (2024)</b>	<b>Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra</b>
<b>Nilai SAKIP Dinsos</b>	71,86	71,91	71,95	100,06

Berdasarkan tabel 3.2.5 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 telah mencapai 100,06 %.

**4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional**

Capaian Kinerja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar.

**5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Keberhasilan pencapaian target indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial didukung oleh Kerjasama yang baik dengan bidang teknis, pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai arahan.

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja ” Nilai SAKIP Dinsos” :

- a. Meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial adalah dengan memperkuat sinergitas perencanaan, anggaran dan pelaksanaan serta memperkuat kerjasama lintas sektor dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.

**6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya (*Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya*)**

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 3 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial" dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi anggaran untuk indikator "Nilai SAKIP Dinsos" sebesar Rp. 4.383.367.872,00 dari total pagu sebesar Rp. 4.699.311.668,00 dengan capaian kinerja sebesar 100,06%

Formulasi perhitungan Efisiensi Sumber Daya terhadap Sasaran Strategis Dinas Sosial sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

CKi = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$\begin{aligned} &= \frac{(4.699.311.668,00 \times 100\%) - 4.383.367.872,00}{4.699.311.668,00 \times 100\%} \times 100 \\ &= \frac{4.699.311.668 - 4.383.367.872}{4.699.311.668} \times 100\% \\ &= \frac{315.943.796}{4.699.311.668} \times 100\% \\ &= 0,067 \end{aligned}$$

**Ket : 100,06% dijadikan 100%**

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Dinsos sebesar -0,736 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.13**  
**Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja**  
**Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	100,06	93,28	0,067
<b>TOTAL</b>			<b>100,06</b>	<b>93,28</b>	<b>0,067</b>

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 3** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Nilai SAKIP Dinsos dengan tingkat efisiensi sebesar 0,067%.

**7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” dengan indikator kinerja “ Nilai SAKIP Dinsos” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.699.311.668,00	4.383.367.872,00	93,28	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.061.690,00	88.612.144,00	98,39
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.369.839.723,00	3.095.018.193,00	91,84
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.606.650,00	112.446.276,00	99,86
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.168.473,00	593.607.648,00	98,74

					Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.069.970,00	83.042.033,00	88,95
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.565.162,00	410.641.578,00	96,64
<b>Total</b>		<b>4.699.311.668,00</b>	<b>4.383.367.872,00</b>	<b>93,28</b>		<b>4.699.311.668,00</b>	<b>4.383.367.872,00</b>	<b>93,28</b>

## B. Akuntabilitas Keuangan

### REALISASI BELANJA

Dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan dinas selama Tahun 2024 melalui belanja langsung maupun tidak langsung.

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 8.069.859.523,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.586.731.701,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,01%.

Komposisi belanja Dinas Sosial untuk tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2.11**  
**Komposisi Belanja Dinas Sosial**  
**Tahun Anggaran 2024**

No.	2024	
	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Operasi	7.751.384.479,00
2	Belanja Modal	318.475.044,00
	<b>Total</b>	<b>8.069.859.523,00</b>

Sumber: DPPA 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 94,01% % terhadap realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2024.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinsos Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.12**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Dinas Sosial**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.142.720.865,00	2.113.252.231,00	98,62
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.227.826.990,00	1.090.111.598,00	88,78
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	4.699.311.668,00	4.383.367.872,00	93,28
		<b>8.069.859.523,00</b>	<b>7.586.731.701,00</b>	<b>94,01%</b>

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis sebesar 94,01% persen dengan formulasi hitungan realisasi anggaran dan Indikator Kinerja anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2024.

**Tabel 3.2.19**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran %	Anggaran	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	137,47	2.113.252.231,00	98,62

2.	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha	51,14	1.090.111.598,00	88,78
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	100,06	4.383.367.872,00	93,27

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap anggaran efektif sebesar 98,62%, untuk mencapai Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap anggaran efektif 88,78%, dan untuk mencapai Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial terhadap anggaran efektif sebesar 93,27%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pencapaian Vsi dan Misi selama tahun anggaran 2024 LKIP Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai satu sasaran dengan satu indikator kinerja sesuai dengan rencana Kinerja tahunan. Dari hasil capaian program dan kegiatan tersebut nilai kuantitatif secara keseluruhan umumnya baik. Beberapa masalah yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran sehingga memerlukan solusi penambahan anggaran dari daerah.

Adapun Pencapaian Target Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja utama Dinas Sosial yaitu “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” tercapai realisasi sebesar 134,32 persen, sedangkan indikator “sasaran” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” capaian realisasi sebesar 55,72 persen dan capaian realisasi pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 100,06 persen dari target “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sebesar 69,02 persen, sedangkan indikator sasaran” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” target sebesar 1.31 persen dan taerget pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 71,86 persen. Dengan kategori “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” Sangat Baik, sedangkan indikator “sasaran” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” kurang dan Kategori pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah Sangat Baik.

Sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 94,01 persen dari target dengan realisasi belanja sebesar Rp. 7.586.731.701,00.

Adapun upaya perbaikan yang akan datang atau ditahun berikutnya adalah dengan menyampaikan usulan kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial provinsi agar kegiatan yang belum diakomodir oleh APBD dapat difasilitasi melalui program kegiatan dan bantuan sosial serta meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan SKPD terkait .

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun anggaran 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan inplementasi rencana kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) dimasa masa mendatang.

Marabahan,        Februari 2025

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### **Pengantaran dan Pendampingan 2 Orang Calon Klien Disabilitas dari Kabupaten Barito Kuala**



### **Pengantaran Kursi Roda untuk Lansia a.n Laminem Bantuan dari Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rangka Hari Lanjut Usia Nasional di Desa Surya Kanta Kec. Wanaraya**



**Pelaksanaan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Dan Sosial di LKSA Ahsanul Huda kec. Bakumpai**



## Pengantaran dan Pendampingan Lansia Disabilitas



## Jumat Selamat 15 Desember 2023 di Kelurahan Ulu Benteng



Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan pendampingan dan pengantaran penyandang disabilitas, Hendro Saputra, warga Kecamatan Marabahan. Kegiatan ini bertujuan untuk fitting tangan palsu yang akan diterima Hendro sebagai calon penerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses fitting berlangsung di Sentra Budi Luhur @sentra\_budiluhur\_banjarbaru, Kota Banjarbaru, pada Sabtu, 16 November 2024. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengukuran awal yang telah dilakukan sebelumnya, pada 19 Oktober 2024, di tempat yang sama. Proses fitting bertujuan untuk memastikan kecocokan dan kenyamanan alat bantu tersebut sesuai dengan kebutuhan Hendro, yang rencananya akan diberikan modal berjualan nasi goreng.

<https://dinsos.baritokualakab.go.id/dinas-sosial-barito.../>



Rabu, 13 November 2024 - Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, melalui Bidang Rehabilitasi Sosial, bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru melaksanakan pendampingan kepada seorang terduga ODGJ terlantar berinisial AS, warga Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Provinsi Kalimantan Selatan.

<https://dinsos.baritokualakab.go.id/dampingi-odgj-terlantar/>



Dinas Sosial Barito Kuala Dampingi Terduga ODGJ Terlantar ke RSJ Sambang Lihum

Giat seleksi penerima calon penerima manfaat klien remaja Panti PRSAR Mulia Satria Prov.KalSel angkatan 7 thn.2025



Seleksi Calon Klien Angkatan VII Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari Prov.KalSel



Dinas Sosial Barito Kuala melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Melaksanakan kegiatan Koordinasi serta penyalurkan bantuan Tali Asih kepada Klien An. Puspita asal tabukan di Panti Fajar Harapan Martapura.



Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melalui Bidang Rehabilitasi Sosial telah melaksanakan kunjungan ke Panti Sosial Tresna Werdha "Budi Sejahtera".

<https://dinsos.baritokualakab.go.id/isu-permasalahan-lansia/>



## Penyerahan Bantuan Permakanaan Lansia



## STOP NARKOBA Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza di Kabupaten Barito Kuala



**Rapat Koordinasi Puskesos-SLRT Bagi Operator SIKs-NG Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 di Aula Selidah**



**Monev Puskesos di desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari**



## Sosialisasi Psikososial Anggota Tagana



## Penyerahan Bantuan Korban Bencana Kebakaran di Desa Antar Raya



**Pengantaran bantuan logistik korban bencana kebakaran di desa Anjir Serapat Baru kec. Anjir Muara, menghanguskan 1 buah rumah, 3 jiwa dan 1 korban meninggal dunia**



**Rakor Karang Taruna Se Kab. Barito Kuala Th. 2024 di Desa Antar Raya**



## Pembinaan PSKS (KT, PSM, dan TKSK) di Ds. Danau Karya Kec. Anjir Pasar



Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Masyarakat/Keluarga Miskin (Pelatihan Pembuatan Kue).  
Selasa, 29 Oktober 2024 di desa Sungai Puting kec. Alalak.





Dinas Sosial  
Kab. Barito Kuala

#BerAKHLAK  
Bersama-sama Perilaku Baik dan Berkeadilan Masyarakat  
Berencana, Layak, Adaptif, Kolaborasi!

# bangga  
melayani  
bangsa

Monitoring dan evaluasi serta  
pembinaan bantuan UEP-P ternak  
ayam di desa Sungai Punggu Baru



<https://dinsos.baritokualakab.go.id>



Dinsos Batola



dinsosbatola@gmail.com



Dinas Sosial  
Kab. Barito Kuala

#BerAKHLAK  
Bersama-sama Perilaku Baik dan Berkeadilan Masyarakat  
Berencana, Layak, Adaptif, Kolaborasi!

# bangga  
melayani  
bangsa



Monitoring dan evaluasi serta  
pembinaan UEP KUBE di desa  
Tamban Kecil



<https://dinsos.baritokualakab.go.id>



Dinsos Batola



dinsosbatola@gmail.com

**Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan UEP KUBE di desa Tamban muara baru kec.Tamban**



**Kegiatan Asistensi Dokumen SAKIP**



**Asistensi Dokumen SAKIP Desk 2**



Dinas Sosial  
Kab. Barito Kuala



### Asistensi dan Sinkronisasi IKK oleh Tim Kemendagri dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023



<https://dinsos.baritokualakab.go.id>



Dinsos Batola



Dinsos Batola



dinsosbatola@gmail.com

### Workshop Penyusunan Peta Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Lingkup Kabupaten Barito Kuala di Hotel Fave Banjarmasin



## Internalisasi Pedoman Penilaian PEKPPP Tahun 2024



**Kunjungan Tim dari MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**



**Monev Lapangan Satgas Pelayanan Publik oleh Bapak Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala Ir. H.Zulkipli Yadi Noor, M.Sc yang dilaksanakan di beberapa SKPD termasuk Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**



Apresiasi Penyerahan Penilaian SAKIP dan Pelayanan Publik

